



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 404 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN  
MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Barang Persediaan Milik Pemerintah Kota Banjarmasin yang tidak digunakan lagi karena sudah tidak sesuai dengan Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi perlu dihapuskan dari Daftar Barang Persediaan Milik Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa barang-barang tersebut telah dimusnahkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan melampirkan Berita Acara Pemusnahan untuk dilakukan penghapusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Barang Persediaan Milik Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 1781);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Pemusnahan / Penjualan / Hibah / Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;

2. Surat Wali Kota Banjarmasin No. 032/840.b-Aset/Bakeuda Perihal Persetujuan Pemusnahan Barang Persediaan;

3. Berita Acara Pemusnahan Barang Persediaan Milik Pemerintah Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Barang Persediaan Milik Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 16 Juli 2021  
WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 4 04 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DAFTAR BARANG PERSEDIAAN MILIK PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

No	SKPD	Nama Barang	Nilai Perolehan (Rp)	Jumlah	Nilai Total (Rp)
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Blangko Kartu Keluarga	4.499	32.500	146.217.500
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Blangko Kutipan Akta Kelahiran	4.950	10.000	49.500.000
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Blangko Kutipan Akta Perkawinan	3.850	380	1.463.000
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Blangko Kutipan Akta Perkawinan	4.840	600	2.904.000
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Blangko Kutipan Akta Perkawinan	4.950	500	2.475.000
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Blangko Kutipan Akta Kematian	4.990	5.000	24.950.000
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Blangko Kutipan Akta Kematian	4.950	5.000	24.750.000
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Blangko Kutipan Akta Perceraian	5.000	845	4.225.000
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Blangko Kutipan Akta Perceraian	3.850	250	962.500
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Blangko Kutipan Akta Perceraian	4.840	400	1.936.000
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Blangko Kutipan Akta Pengakuan Anak	4.840	500	2.420.000
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Blangko Kutipan Akta Pengakuan Anak	4.980	450	2.241.000
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Blangko Kutipan Akta Pengesahan Anak	4.990	150	748.500
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Register Akta Kelahiran	949,3	16.000	15.188.800
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Register Akta Kematian	949,3	5.000	4.746.500
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Register Akta Perkawinan	949,3	500	474.650
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Buku Register Akta Kematian	49.990	80	3.999.200
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Buku Register Akta Perkawinan	38.500	15	577.500

No	SKPD	Nama Barang	Nilai Perolehan (Rp)	Jumlah	Nilai Total (Rp)
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Buku Register Akta Perkawinan	49.500	13	643.500
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Buku Register Akta Perkawinan	39.600	38	1.504.800
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Buku Register Akta Perceraian	50.000	18	900.000
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Buku Register Akta Perceraian	38.500	15	577.500
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Buku Register Akta Perceraian	49.500	7	346.500
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Buku Register Akta Perceraian	49.970	4	199.880
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Buku Register Akta Pengakuan Anak	49.500	10	495.000
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Buku Register Akta Pengakuan Anak	49.970	25	1.249.250
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Buku Register Akta pengesahan Anak	49.990	3	149.970
28	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Blangko KTP WNI	1.450	798	1.157.100
29	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Blangko Kutipan Akta Adopsi	5.000	236	1.180.000
30	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Buku Register Akta Adopsi	40.000	10	400.000
31	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Formulir Surat Kuasa	90.000	8	720.000
32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Formulir Surat Pernyataan Kelahiran (P3)	129.000	15	1.935.000
33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Formulir Surat Pernyataan Kelahiran ASI (P5)	129.000	1	129.000
<b>JUMLAH</b>					<b>301.366.650</b>

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA